

PARTISIPASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKOSISTEM INOVASI (TANTANGAN DAN PELUANG)

*The Participation of Regional Government Agencies of Jambi Province
in Efforts to Improve Innovation Ecosystem
(Challenges and Opportunities)*

Weni Lestari¹, Joni Martin²

¹BRIDA Provinsi Jambi, Jln. RM Nur Atmadibrata Telanaipura

¹wenilestarisp@gmail.com, ²joni.martin991@gmail.com

Diterima : 17 September 2025; Direvisi: 08 November 2025; Disetujui : 17 November 2025
DOI : <https://doi.org/10.37250/khazanah.v8i1.361>

Abstract

This study aims to analyze the participation of regional government agencies within the scope of the Jambi Provincial Government in improving the Innovation Ecosystem based on the results of the achievement of the Regional Innovation Index (IID). This study uses secondary data derived from documents in the form of reports, journals and other related documents. The results show that The participation by regional agencies has fluctuated, indicating that there are challenges and opportunities in improving the innovation ecosystem in Jambi Province, especially the human resources capacity of each regional agency in proposing its innovations. Recommendations include maintaining institutional consistency, encouraging cross-regional collaboration, and ensuring that each regional agency is required to produce at least one innovation per year to maintain regional competitiveness.

Keywords: Competitiveness, Innovation, Regional Government Agencies.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi perangkat daerah lingkup pemerintah Jambi dalam meningkatkan ekosistem inovasi berdasarkan hasil capaian Indeks Inovasi Daerah (IID). Kajian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen berupa laporan, jurnal dan dokumen terkait lainnya dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi perangkat daerah mengalami fluktuasi yang mengindikasikan bahwa ada tantangan dan peluang dalam meningkatkan ekosistem inovasi di Provinsi Jambi terutama kapasitas sumber daya manusia dari masing-masing perangkat daerah dalam mengusulkan inovasinya. Rekomendasi antara lain menjaga konsistensi kelembagaan, mendorong kolaborasi lintas OPD, serta memastikan bahwa setiap OPD memiliki kewajiban menghasilkan inovasi minimal satu per tahun untuk menjaga daya saing daerah

Kata kunci: Daya Saing, Inovasi, Perangkat Daerah

PENDAHULUAN

Inovasi telah menjadi elemen esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang memungkinkan pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi dan budaya secara kreatif dan adaptif serta responsif terhadap perubahan zaman. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya regulasi yang mampu menjamin bahwa inovasi bukan hanya bersifat ad hoc, melainkan terstruktur, terukur dan berkelanjutan.

Sebagai landasan hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan inovasi yang terencana dan sistematis, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan inovasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satu ketentuan yang signifikan dalam Perda ini terdapat tercantum dalam Pasal 13 yang

menyatakan bahwa "Setiap unit kerja Perangkat Daerah Provinsi wajib mengajukan inisiatif inovasi setiap tahun yang berhubungan dengan tugas perangkat daerah tersebut"(Pemerintah Provinsi Jambi, 2020). Ketentuan ini menjadi penting karena mewajibkan setiap unit kerja di Pemerintah Provinsi Jambi untuk secara aktif berkontribusi dalam inovasi, bukan hanya menunggu inisiasi dari lembaga tertentu saja. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi dan kreativitas perangkat daerah dalam menghadirkan solusi inovatif di bidangnya masing-masing, sehingga inovasi tidak hanya menjadi keinginan, tetapi menjadi bagian rutin dari aktivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi daerah merujuk pada pembaharuan atau terobosan baru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik melalui inovasi dalam produk, proses, organisasi, layanan publik, maupun regulasi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing, maupun efektivitas pemerintahan. Tanpa

adanya inovasi, apalagi dalam dunia modern yang dinamis ini, dapat dipastikan daerah akan mengalami kemunduran dalam segala aspeknya.

Sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi (Pemerintah Provinsi Jambi, 2025). Ekosistem inovasi dibutuhkan untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi di Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong inovasi, hal ini dibuktikan Provinsi Jambi meraih kategori “Provinsi Sangat Inovatif” pada Innovative Government Award (IGA) tahun 2021. Disamping itu, pemberian penghargaan lomba inovasi daerah untuk pemerintah Provinsi Jambi serta pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi terakhir dilaksanakan pada 12 Desember 2024 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Komitmen dan kerangka hukum di Provinsi Jambi dalam meningkatkan ekosistem inovasi telah tersedia, kemudian diperkuat dengan menetapkan inovasi sebagai

salah satu sasaran pembangunan daerah dengan penekanan pada peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai tolok ukur, realisasi inovasi di Provinsi Jambi masih menunjukkan pola fluktuatif. Berdasarkan hasil pengukuran Kementerian Dalam Negeri, pencapaian IID di Provinsi Jambi tahun 2021 sebesar 61,03 turun menjadi 37,91 pada tahun 2023 dan kembali naik pada tahun 2024 dengan skor 58,59. Fluktuasi skor ini menunjukkan dalam mengusulkan inovasi masing-masing perangkat daerah (OPD) tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai kendala seperti kejenuhan perangkat daerah dalam mendokumentasikan inovasi, pergantian SDM pelaksana inovasi hampir setiap tahun, keterbatasan dukungan anggaran dan insentif bagi inovator di lingkup perangkat daerah serta kurangnya sinergi antara stakeholder.

Salah satu upaya untuk meningkatkan skor tersebut diatas maka diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif perangkat daerah dalam menginisiasi inovasi. Hal ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kualitas inovasi daerah dan daya dukung infrastruktur. Walau bagaimanapun perangkat

daerah juga memiliki keterbatasan dalam berkolaborasi dan menciptakan inovasi. Penelitian ini tidak hanya memaparkan kebijakan inovasi secara normatif, tetapi juga mengevaluasi dinamika pelaksanaannya melalui pengukuran fluktuasi Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi periode 2021-2024.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas wacana dalam studi administrasi publik dan kebijakan inovasi dengan memperkenalkan pendekatan *ecosystem based policy implementation* pada konteks pemerintahan daerah. Secara praktis, kajian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat sinergi antar OPD, meningkatkan konsistensi pelaksanaan inovasi, serta mengoptimalkan faktor pendukung seperti kapasitas sumber daya manusia, pendanaan, dan koordinasi kelembagaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kajian untuk mengetahui peran serta OPD dalam upaya meningkatkan ekosistem inovasi sekaligus mengetahui tantangan dan peluangnya untuk menghasilkan inovasi.

LANDASAN TEORI

Partisipasi adalah wujud keikutsertaan dalam sebuah kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau peran serta. Menurut (Tilaar, 2009) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Dalam KBBI, inovasi diartikan sebagai pengenalan atau penerapan hal-hal baru atau perbaikan. Definisi lainnya adalah inovasi baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya baik gagasan, metode ataupun alat. Inovasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Rosenfeld dalam (Sutarno, 2012) Inovasi merupakan pengalihan pengetahuan menjadi produk, proses dan layanan baru. Menurut (Fontana, 2009) inovasi adalah penerapan metode baru

atau gabungan dari metode lama dalam mengubah input menjadi output, yang menghasilkan perubahan signifikan dalam hubungan antara manfaat dan harga yang tersedia bagi konsumen dan/atau pengguna, komunitas serta lingkungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat ketentuan khusus mengenai inovasi daerah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda), Pemda diberi kewenangan untuk melaksanakan berbagai bentuk inovasi. Inovasi dimaknai segala bentuk pembaharuan dalam praktik penyelenggaraan pemda. Ide inovasi bisa berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat daerah ataupun masyarakat. Aturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi pemda dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi.

Jenis inovasi daerah bisa berupa inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi produk sektoral. Kunci keberhasilan inovasi daerah adalah keberanian kepala daerah, komitmen birokrasi dan kolaborasi

masyarakat. Regulasi nasional sudah memberikan ruang aman dan pedoman hukum untuk inovasi daerah (Febrian, 2018).

Partisipasi dalam arti sempit sebagai keanggotaan nominal, dan dalam arti luas adalah proses interaktif dinamis dimana semua pemangku kepentingan, termasuk yang paling kurang beruntung memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini digunakan karena bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan serta perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam (Moelong, 2007). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terkait dengan skor inovasi daerah Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah Provinsi berupa Ranwal RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, laporan dan publikasi terkait IID dari laman website.

Analisis dilakukan dengan membandingkan skor dan indikator dari tahun ke tahun serta mengidentifikasi kontribusi

perangkat daerah. Partisipasi dilihat dari keikutsertaan dan keaktifan OPD dalam mengusulkan inovasi setiap tahunnya. Analisis juga diperkuat dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) guna memetakan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi partisipasi perangkat daerah dalam ekosistem inovasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) dikumpulkan dari data mengenai berbagai aspek inovasi daerah seperti profil inovasi daerah (nama, jenis, tahapan, tujuan, manfaat) dan data pendukung terkait pelaksanaan inovasi, kemudian menginputnya kedalam sistem penilaian. IID Hasil skor IID Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks Inovasi Daerah dan Peringkat Provinsi Jambi

Tahun	Skor IID	Peringkat
2021	61,03	7
2022	50,45	17
2023	37,91	28
2024	58,59	13

Sumber: BKSDN, Kemendagri

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi mengalami fluktuasi signifikan 2021-2024 dari posisi 7 besar (2021)

anjlok ke peringkat 28 (2023), lalu pulih ke peringkat 13 (2024). Kondisi ini menunjukkan potensi besar inovasi daerah, namun juga mengindikasikan tantangan dalam konsistensi implementasi.

Pada tahun 2021 skor cukup tinggi yang menempatkan Provinsi Jambi di posisi 7 besar nasional dengan predikiat “*sangat inovatif*”. Hal ini menunjukkan inovasi daerah berjalan dengan baik, baik dari segi tata kelola, pelayanan publik maupun program pembangunan. Pada tahun 2023 adalah titik terendah dalam periode ini. Peringkat juga jatuh drastis ke posisi 28. Kondisi ini mencerminkan adanya stagnasi inovasi daerah, lemahnya adopsi digitalisasi, atau kurang optimalnya kolaborasi antar perangkat daerah. Kemudian pada tahun 2024 skor kembali meningkat signifikan dan peringkat naik ke posisi 13. Hal ini menandakan adanya pemulihan inovasi, kemungkinan karena adanya dorongan kebijakan strategis dan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja inovasi dan partisipasi perangkat daerah dan masyarakat.

Stagnasi inovasi juga pernah terjadi pada pemerintah Kota Palembang, tetapi berhasil menjadi

salah satu kota paling inovatif di Indonesia periode 2020-2022 yang menunjukkan komitmen kuat dan strategi yang efektif dalam meningkatkan inovasi daerah melalui pendekatan tata kelola strategik yang terdiri dari lima tahapan yaitu tujuan, lingkungan, pengarahannya, aksi dan tahap evaluasi (Putra & Fitriati, 2023). Sementara untuk mengatasi stagnasi inovasi Kota Jambi melakukan kolaborasi Pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media) dalam meningkatkan inovasi daerah serta memperkuat daya saing pembangunan (Agustini et al., 2024).

Kegagalan inovasi daerah merupakan sumber pembelajaran penting bagi peningkatan kualitas inovasi berikutnya. Keberhasilan inovasi daerah sangat bergantung pada kebijakan pendukung dan regulasi yang jelas, ketersediaan sumber daya (manusia, finansial, teknologi), Birokrasi yang adaptif dan sederhana dan insentif dan dukungan berkelanjutan bagi inovator (Manar & Alfirdaus, 2023).

Tren IID Provinsi Jambi tersebut diperlukan sinergi lintas perangkat daerah agar inovasi tidak hanya bergantung pada program

sesaat, penguatan kapasitas ASN dan keterlibatan masyarakat agar skor IID terus naik secara bertahap. sebagaimana yang ditargetkan dalam Rancangan awal RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029.

Provinsi Jawa Barat dianggap model keberhasilan inovasi daerah melalui berbagai program menunjukkan bahwa inovasi daerah yang konsisten mampu meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat (Febrian, 2018).

Partisipasi Perangkat Daerah

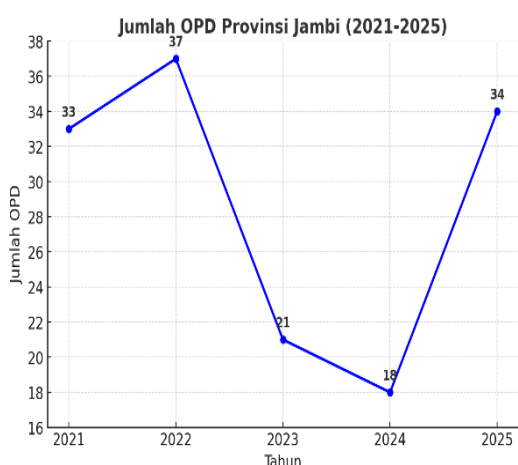
Dalam konteks Provinsi Jambi, Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam menghasilkan kebijakan, regulasi, penyediaan data dan pelaksanaan inovasi. Keterlibatan aktif dari perangkat daerah menjadi komponen penting dalam mendukung suksesnya sebuah inovasi oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jambi bisa saling bersinergi baik sesuai dengan amanat Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap unit kerja perangkat daerah Provinsi Jambi setiap tahun harus mengajukan inisiatif inovasi yang

berhubungan dengan bidang tugas masing-masing setiap tahunnya.

Jumlah Partisipasi perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengusulkan Inovasi juga berfluktuasi yang akan ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Partisipasi Perangkat Daerah berdasarkan Jumlah OPD Pemerintah Provinsi Jambi

Gambar diatas menunjukkan

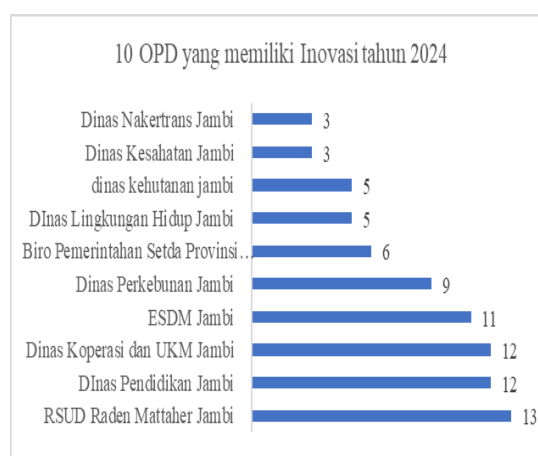


bahwa OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sangat fluktuatif antara tahun 2021-2025. Tahun 2022 dan 2025 adalah puncak OPD yang membuka peluang besar bagi pengusulan inovasi. Sebaliknya tahun 2023-2024 adalah masa kritis karena jumlah OPD minim, yang berpotensi menghambat kinerja inovasi.

Dilihat dari peran serta OPD dari tahun 2021-2025 menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi oleh OPD dalam mengusulkan inovasi. Beberapa diantaranya adalah tidak memiliki dokumen inovasi yang lengkap, keterbatasan SDM, operator yang tidak memiliki insentif, kurang dihargai bahkan bekerja sendiri.

Pada tahun 2024 OPD yang menghasilkan inovasi hanya sekitar 10 OPD yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Inovasi OPD Tahun 2024.



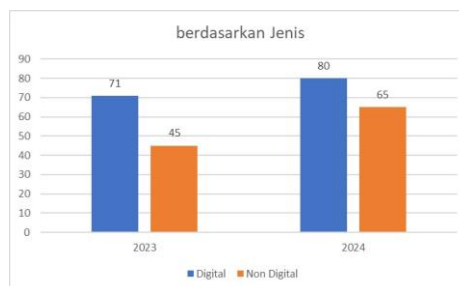
Gambar 2 menunjukkan OPD yang menghasilkan inovasi relatif tinggi adalah RSUD Raden Mattaher. Hal ini menunjukkan bahwa diantara OPD, RSUD Raden Mattaher paling produktif atau paling aktif dalam menghasilkan inovasi di tahun

2024. Sementara OPD dengan inovasi relatif rendah adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Nakertrans yang memiliki masing-masing 3 inovasi. Hal ini diduga beberapa faktor seperti fokus pada pelayanan rutin, keterbatasan sumber daya, atau belum ada dorongan/insentif yang cukup untuk inovasi.

Beberapa alasan diatas memperkuat temuan penelitian oleh (Pratiwi, 2018) yang mengemukakan kendala utama implementasi e-government disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem antar instansi, sarana dan prasarana teknologi yang masih terbatas, dan SDM yang kurang menguasai teknologi informasi.

Menurut data inventarisasi inovasi daerah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, inovasi dibedakan menjadi dua kategori utama: digital dan non digital. Gambar 3 dibawah ini memperlihatkan jumlah inovasi digital dan non digital yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi Jambi tahun 2023-2024.

Gambar 3. Jenis Inovasi OPD Tahun 2023-2024



Gambar 3 menggambarkan tren pertumbuhan, Inovasi digital mengalami kenaikan sekitar 12,7% sementara non digital tumbuh jauh lebih tinggi yaitu sekitar 44,4%. Ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa pertumbuhan non digital secara relatif jauh lebih agresif dibanding digital.

Dengan menghadirkan inovasi dari kedua jenis tersebut, OPD Provinsi Jambi ingin memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya berjalan di ranah digital, tetapi juga tetap responsif terhadap kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat yang mungkin lebih mengandalkan layanan non-digital.

Berdasarkan pengukuran Indeks Inovasi Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024 (Balitbangda, 2024) diperoleh bahwa ada enam OPD yang meraih juara dengan predikat ter-inovatif dan sangat inovatif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Lingkup OPD Provinsi Jambi

Juara	Nama OPD	IID	Kategori
Juara 1	RSUD Raden Mattaher	87,17	Ter-Inovatif
Juara 2	Dinas Pendidikan	82,33	Ter-Inovatif
Juara 3	Dinas ESDM	78,00	Sangat Inovatif
Harapan 1	Dinas Kop&UKM	67,08	Sangat Inovatif
Harapan 2	Biro Pem dan Otda	66,33	Sangat Inovatif
Harapan 3	BKD	62,50	Sangat Inovatif

Sumber: Balitbangda, 2024

Dari Tabel 2 diatas terlihat bahwa RSUD Raden Mattaher dan Dinas Pendidikan memperoleh predikat “Ter-inovatif” sementara 4 OPD lainnya memperoleh predikat “sangat inovatif”. Skor inovasi yang diukur mencerminkan semangat kreativitas, kolaborasi dan komitmen layanan publik OPD kepada masyarakat.

Analisis SWOT Inovasi Daerah

Kekuatan (Strengths)

1. Landasan hukum yang jelas
Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 13 memberikan legitimasi kuat dan mewajibkan setiap OPD mengusulkan inisiatif inovasi

tiap tahun.

2. Komitmen Pemerintah Daerah
Terlihat dari pencapaian sebagai Provinsi Sangat Inovatif (IGA tahun 2021) dan penyelenggaraan lomba inovasi daerah secara rutin.
3. Peran strategis OPD
OPD memiliki kewajiban dan ruang gerak dalam menginisiasi inovasi, baik dalam layanan publik, regulasi, maupun tata kelola pemerintahan.
4. Peningkatan skor IID
Skor IID menunjukkan adanya pemulihan setelah pandemi, meskipun bertahap
5. Sasaran RPJMD 2025-2029 yang jelas
Menargetkan terbentuknya ekosistem inovasi yang mendukung daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kelemahan (Weakness)

1. Fluktuasi Jumlah OPD
Tahun 2023-2024 jumlah OPD menurun drastis sehingga berpotensi menghambat konsistensi inovasi
2. Kurangnya konsistensi implementasi inovasi
Skor IID menurun tajam dari peringkat 7 (tahun 2021) ke peringkat 28 (tahun 2023).

3. Keterlibatan SDM dan Infrastruktur

Masih terdapat kekurangan dalam kapasitas ASN, adopsi digitalisasi dan dukungan teknologi.

4. Resistensi Terhadap Perubahan

Beberapa perangkat daerah masih cenderung menjalankan rutinitas tanpa mendorong inovasi baru

5. Kolaborasi antar stakeholder belum optimal

Sinergi lintas sektor dan lintas OPD masih lemah sehingga inovasi tidak selalu berkelanjutan.

Peluang (Opportunities)

1. Dukungan regulasi nasional UU Nomor 23 Tahun 2014 memberi ruang luas bagi daerah untuk melakukan inovasi

2. Perkembangan teknologi digital Menjadi peluang besar untuk mengakselerasi transformasi layanan publik dan tata kelola daerah

3. Ekosistem inovasi tahun 2025-2029 Target pembangunan daerah membuka ruang untuk investasi, peningkatan IID dan

peningkatan pengeluaran IPTEK

4. Partisipasi masyarakat Masyarakat dapat turut berkontribusi dalam menciptakan inovasi berbasis kebutuhan lokal

5. Momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Dapat dijadikan pijakan untuk memperkuat inovasi yang berorientasi pada daya saing daerah.

Ancaman (Threats)

1. Fluktuasi daya saing dan inovasi daerah Ketidakstabilan skor IDSD dan IID menunjukkan rentan stagnasi

2. Ketimpangan antar daerah Perbedaan potensi dan kapasitas antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi bisa menghambat inovasi terintegrasi

3. Perubahan politik dan birokrasi Rotasi pejabat dan pergantian kepala daerah berpotensi mengganggu kesinambungan inovasi

4. Keterbatasan anggaran daerah Alokasi dana untuk riset, IPTEK dan inovasi masih minim (hanya sekitar 0,32 %

APBD 2024)

5. Ancaman disrupti global
- Persaingan antar daerah dalam konteks nasional dan internasional menuntut inovasi yang cepat, sedangkan Provinsi Jambi masih dalam tahap pemulihan.

Strategi yang dapat dirumuskan dari analisis SWOT diatas adalah menguatkan kelembagaan OPD, meningkatkan kapasitas ASN, mengoptimalkan digitalisasi, mendorong kolaborasi lintas sektor serta menjaga konsistensi kebijakan inovasi untuk menjaga tren peningkatan IID.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Partisipasi OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dalam menghasilkan inovasi menunjukkan trend yang berfuktuasi. Permasalahan menunjukkan OPD masih fokus pada pelayanan rutin, belum ada dorongan/insentif untuk menghasilkan inovasi, dan keterbatasan kapasitas SDM operator yang ditunjuk masing-masing OPD untuk menginput inovasi.

Rekomendasi

Langkah-langkah yang dapat

diambil Pemerintah Provinsi Jambi untuk penguatan inovasi daerah diantaranya adalah:

1. Konsistensi Kelembagaan, Pemerintah Provinsi Jambi perlu menjaga stabilitas jumlah dan fungsi OPD agar perencanaan inovasi dapat berkesinambungan
2. Optimalisasi fungsi OPD, meskipun jumlah OPD menurun pada tahun tertentu, perlu ada strategi agar setiap OPD tetap menghasilkan minimal satu inovasi per tahun
3. Kolaborasi antar OPD, dengan fluktuasi jumlah OPD, kolaborasi lintas sektor menjadi solusi agar inovasi tetap terjaga meski jumlah lembaga berkurang

Pemetaan kapasitas OPD, identifikasi OPD dengan kapasitas tinggi untuk menjadi motor penggerak inovasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provins Jambi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi atas dukungan data dan informasi yang diperlukan dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, T. W., Rozi, P., & Fitri, A. (2024). Strategi Inovasi Daerah Melalui Kolaborasi Pentahelix di Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 16(2).
Balitbangda. (2024). *Laporan Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi*.
Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan Terhadap Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal Kajian Pemerintahan*, IV(1), 48–61.
Fontana. (2009). *Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
H.A.R. Tilaar. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Rinika Cipta.
Manar, D. G., & Alfirdaus, L. K. (2023). Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintah Daerah. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 18–30.
<https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.18-30>
Moelong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
Pemerintah Provinsi Jambi. (2020). *Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020*.
jdih.jambiprov.go.id/fileperaturan/9617PERDANo2Tahun2020.pdf?utm_source=chatgpt.com
Pemerintah Provinsi Jambi. (2025). *Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029*.
Pratiwi, C. S. (2018). Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government di Provinsi Jambi. *Khazanah Intelektual*, 2(1), 109–126.
Putra, M. G., & Fitriati, R. (2023). Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2).
Sutarno. (2012). *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Graha Ilmu.